BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Dalam Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mengalami masalah salah satu masalahnya yaitu dalam pelaporan pertanggung jawaban yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, mengalami pengunduran waktu atau laporan pertanggungjawaban tersebut baru dilaporkan lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Dalam Proses Penyusunannya meliputi tahap pelaksanaan anggaran, dimana antara satu dengan yang lainnya sangat berhubungan erat, karena dokumen-dokumen yang digunakan dirancang dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, maka Penyusunan APBD yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat dikatakan dengan baik.
2. Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung diantaranya adanya perbedaan pendapat antara eksekutif dan dewan legislatf sehingga mengulur waktu yang cukup lama, serta Laporan

pertanggungjawaban yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, mengalami pengunduran waktu atau laporan pertanggungjawaban tersebut baru dilaporkan lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Dan dalam upaya penanganan masalah yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu harus lebih tegas lagi dalam menetapkan waktu penyusunan Anggaran Pendapat Belanja Daerah serta menjaga keharmonisan antara eksekutif dan dewan legislatif.

5.2 Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan masukan atau saran yang berkaitan dengan proses penyusunan APBD di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan yang mengalami hambatan Dinas Tenaga Kerja harus melakukan beberapa hal dalam penyelesaian hambatan tersebut dengan melakukan evaluasi, laporan bulanan yang harus diperiksa dengan teliti, ataupun laporan pertriwulan.
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung harus lebih tegas lagi dalam menetapkan waktu pemutusan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta harus bisa mengambil nilai positif atau mengambil poin-poin penting dalam pembahasan rencana kegiatan agar perbedaan pendapat yang terjadi antara eksekutif dan dewan legislatif tidak terjadi dalam waktu yang lama yang dapat menghambat keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan lebih memfokuskan lagi pada kinerja program

pelakasanaan proses penyusunan dan harus bisa membagi waktu dan mempunyai cadangan waktu.